BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Rumah tangga pedesaan umumnya memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga perkotaan akibat keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta ketergantungan pada sektor informal dan pertanian subsisten. Struktur ekonomi tersebut menyebabkan pendapatan rumah tangga bersifat fluktuatif dan tidak pasti, sehingga sangat rentan terhadap perubahan harga, gagal panen, maupun guncangan ekonomi makro. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan pedesaan bukan sekadar persoalan individual, melainkan masalah struktural yang memerlukan intervensi kebijakan publik yang sistematis dan berkelanjutan (Onibala & Setyari, 2023).

Kerentanan ekonomi rumah tangga pedesaan semakin meningkat ketika pandemi COVID-19 melanda. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi berdampak langsung pada menurunnya kesempatan kerja serta melemahnya sektor informal yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat desa. Penurunan pendapatan tersebut menghambat kemampuan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan,

kesehatan, dan pendidikan, serta meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Krisis ini mempersempit ruang adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi, sehingga mempertegas urgensi kehadiran kebijakan perlindungan sosial yang responsif dan tepat sasaran (Yendra & Wetsi, 2025).

Dalam merespons tekanan sosial-ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia memperkuat kebijakan perlindungan sosial berbasis transfer tunai melalui pemanfaatan Dana Desa. Salah satu bentuk konkret kebijakan ini adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang dialokasikan bagi keluarga miskin dan rentan di tingkat desa. Perubahan orientasi penggunaan Dana Desa ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan fiskal dalam menghadapi kondisi darurat, sekaligus menegaskan peran Dana Desa tidak hanya sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai alat perlindungan sosial masyarakat desa (Rohmah & Kumalasari, 2024).

Desa Kambitin sebagai bagian dari wilayah pedesaan di Kabupaten Tabalong turut mengimplementasikan kebijakan BLT Dana Desa secara berkelanjutan sejak masa pandemi hingga periode pascapandemi. Berdasarkan data Pemerintah Desa Kambitin, jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa pada periode penelitian mencapai 10 keluarga,pada tahun 2026 yang tersebar pada rumah tangga dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi. Sebagian besar penerima manfaat menggantungkan penghidupan pada pekerjaan harian, usaha kecil berskala rumah tangga, serta sektor pertanian

tradisional yang memiliki tingkat kepastian pendapatan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa BLT Dana Desa menjadi sumber pendapatan tambahan yang relatif penting dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga miskin di Desa Kambitin.

Meskipun demikian, implementasi BLT Dana Desa di Desa Kambitin tidak terlepas dari dinamika sosial di tingkat lokal. Munculnya persepsi ketidakadilan dalam penetapan penerima manfaat, kecemburuan sosial antarwarga, serta perbedaan pola pemanfaatan bantuan masih menjadi isu yang berkembang di masyarakat.

Dalam pengamatan penulis saat obserbasi awal di desa Kambitin Kecamatan Tanjung, penulis mendapatkan informasi bahwa secara ekonomi kehidupan keluarga penerima BLT Dana Desa belum terjadi perubahan sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Penerima BLT Dana Desa memanfaatkan dana yang diberikan tersebut yang berjumlah Rp. 300.000 perbulan hanya mampu untuk keperluan makan sehari-hari dan itu masih tidak cukup, sehingga penerima BLT Dana Desa harus bersusah payah lagi mencari penghasilan dengan meminta upah pekerjaan lain (serabotan). Salah satu contoh yang ditemukan adalah keluarga Sudarto

Fenomena implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kambitin menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan sosial yang kompleks di masyarakat. Munculnya kecemburuan sosial dipicu oleh persepsi

ketidakadilan dalam distribusi bantuan, khususnya terhadap keluarga penerima manfaat yang menerima BLT secara berkelanjutan sejak awal program, sementara sebagian masyarakat lain yang merasa memiliki kondisi serupa tidak lagi memperoleh bantuan. Kondisi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa penerima bantuan jangka panjang tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam tingkat kesejahteraan, sehingga memunculkan anggapan bahwa bantuan bersifat konsumtif dan kurang efektif dalam mendorong peningkatan taraf hidup. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas hubungan sosial yang ditandai dengan rasa iri, ketidakpuasan, prasangka, hingga munculnya stigma negatif terhadap penerima bantuan. Dengan demikian, implementasi BLT Dana Desa tidak hanya menimbulkan persoalan efektivitas ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya kohesi sosial, sehingga diperlukan kajian empiris yang mendalam untuk menilai dampak sosial-ekonomi kebijakan tersebut secara komprehensif dalam konteks lokal Desa Kambitin.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Firmansyah & Fanida, 2025) bahwa sebagian besar penerima BLT Dana Desa menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, khususnya pangan dan kebutuhan rumah tangga harian. Pola ini menunjukkan bahwa BLT Dana Desa berfungsi efektif sebagai jaring pengaman sosial jangka pendek, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rohmah & Kumalasari, 2024; Sekita et al., 2024) memperlihatkan bahwa BLT Dana Desa berkontribusi positif terhadap peningkatan daya beli dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin. Namun, dampak yang dihasilkan cenderung bersifat sementara dan belum mampu mendorong perubahan kesejahteraan yang berjangka panjang. Sebagian besar studi masih menggunakan pendekatan kualitatif atau deskriptif, sehingga belum mampu mengukur besaran pengaruh BLT Dana Desa terhadap kesejahteraan keluarga secara statistik dan objektif. Selain itu, penelitian pada level desa tertentu masih relatif terbatas, padahal karakteristik sosial-ekonomi lokal sangat memengaruhi efektivitas kebijakan.

Berdasarkan observasi awal terhadap Penerima BLT Dana Desa di desa Kambitin dan Penelitian terdahulu yang menujukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dampak sosial-ekonomi BLT Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil observasi awal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak social-ekonomi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Desa Kambitin.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak sosial – ekonomi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Desa Kambitin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak sosial-ekonomi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Desa Kambitin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik dan ekonomi pembangunan desa, khususnya terkait efektivitas program bantuan sosial berbasis transfer tunai. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan konsep kesejahteraan keluarga dalam konteks pedesaan, serta memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara bantuan sosial dan perubahan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi studi selanjutnya yang mengkaji kebijakan perlindungan sosial berbasis Dana Desa dengan pendekatan kuantitatif.

2. Manfaat Praktis.

   Secara praktis, manfaat penelitian ini meliputi:

a. Kepada pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
b. Kepada pemerintah desa, memberikan dasar evaluasi berbasis data dalam menilai efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa.
c. Kepada masyarakat, memberikan masukan bagi pengelola program Dana Desa dalam mengintegrasikan BLT dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
d. Kepada mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam menerapkan teori administrasi publik, kebijakan publik, serta metode penelitian kuantitatif ke dalam praktik penelitian lapangan.